PONTIANAK POST

JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUST | SEP | OKT | NOV | DES | 2016

HAL: 02

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Mayoritas Pegawai Sibuk Bikin SPJ

Jokowi Minta Laporan Simpel

JAKARTA – Pelaporan keuangan yang rumit menjadi sorotan Presiden Joko Widodo saat membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Istana Negara kemarin (20/9). Dia meminta pelaporan keuangan, khususnya bagi petugas di lapangan, lebih disederhanakan.

Yang terjadi saat ini, para pejabat hingga pegawai di lingkungan pemerintah lebih sibuk membuat laporan keuangan daripada bekerja. Jokowi menyebutkan, hampir 70 persen birokrat punya kesibukan semacam itu. "Kalau lembur sampai malam, saya tanya, *ngurus* apa ini? SPj, Pak," ungkap Jokowi di hadapan para peserta rakernas yang mayoritas merupakan pejabat bagian keuangan.

Menurut dia, harus mulai dipikirkan cara membuat laporan yang simpel dan berorientasi hasil sehingga mudah dicek serta dikontrol. Selain itu, energi karyawan tidak habis untuk menyusun surat pertanggungjawaban (SPj). "Contohnya, sekarang banyak guru dan kepala sekolah yang tidak fokus pada kegiatan belajar-mengajar karena *ngurus* SPj," lanjutnya.

Begitu pula dengan Kementerian PUPR atau dinas sejenis di daerah. Seharusnya, 80 persen konsentrasi mereka ditujukan pada pekerjaan di lapangan. Namun, yang terjadi, birokrasinya disibukkan dengan SPj. Para penyuluh lapangan yang biasanya rajin turun berinteraksi dengan petani kini juga lebih sering berada di belakang meja menyusun SPj.

Memang, perubahan basis laporan dari kas ke akrual membuat pelaporan keuangan lebih sulit. Namun, tambah Jokowi, tidak berarti energi pegawai kemudian habis untuk membuat laporan.

Dalam pembukaan rakernas tersebut, Jokowi juga memberikan penghargaan bagi kementerian/lembaga (K/L) maupun pemda yang berprestasi. Laporan keuangan mereka konsisten wajar tanpa pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut.

Mereka adalah 22 K/L, 3 provinsi, 8 kabupaten, dan 4 kota. Beberapa di antaranya adalah MPR, DPR, Kementerian Perindustrian, Mahkamah Konstitusi, Provinsi Jabar dan NTB, serta Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Lubuklinggau.

Jokowi mengingatkan agar kementerian, lembaga, maupun pemda tidak langsung bangga apabila mendapat opini WTP dari BPK. "Opini WTP bukan jaminan tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan, tidak ada praktik korupsi," ucapnya.

Kalau lembur sampai malam, saya tanya, *ngurus* apa ini? SPj, Pak"

Jokowi
Presiden RI

Justru, dengan WTP, lembaga harus lebih keras bekerja membangun budaya keuangan yang transparan.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menyatakan, dirinya sudah berbicara dengan presiden lewat telepon mengenai SPj yang simpel. Prinsipnya, waktu bagi aparat yang seha-

PONTIANAK POST

JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUST | SEP | OKT | NOV | DES | 2016

HAL: 02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

rusnya berada di lapangan tidak boleh tersita untuk mengurus SPj. "Saya sudah meminta Dirjen Perbendaharaan untuk memperbaiki peraturan menteri keuangan (PMK) sehingga penyederhanaan itu terjadi," katanya setelah pembukaan.

Penyederhanaan itu nanti berupa format laporan, bentuk, hingga detail laporan. Meski demikian, dalam menyederhanakan laporan tersebut, pihaknya akan berkonsultasi dengan BPK. "Agar penyederhanaan itu kemudian tidak menyebabkan mereka menjadi *disclaimer* (tidak mendapat opini, Red)," lanjut mantan *managing director* Bank Dunia itu.

Yang menjadi persoalan selama ini, masing-asing kementerian/lembaga (K/L) bertindak terlalu jauh. Pihaknya sudah mengeluarkan PMK, namun masing-masing K/L tetap menerbitkan petunjuk teknis. Misalnya, membuat laporan enam kali, bahkan sampai delapan kali, dengan berbagai bentuk. Juknis-juknis itulah yang nanti diminta untuk dihapus.

Semua juknis akan disamakan dan dirangkum dalam satu PMK. Dengan demikian, tidak ada lagi tambahan pekerjaan di K/L di luar petunjuk Kemenkeu. Tolok ukurnya akan menggunakan para aparat yang bertugas di lapangan. Yakni, apakah pekerjaan membuat laporan keuangan sudah tidak terlalu membebani mereka.

Penyederhanaan itu nanti juga diutamakan untuk laporan keuangan mengenai bantuan sosial. "Ini menjadi salah satu biang keladi dari sisi SPj yang sangat *complicated*," ujarnya.

Pihaknya akan merancang agar laporan keuangan bansos bisa dibuat sederhana tanpa mengurangi akuntabilitas. Sebab, penyederhanaan laporan juga tidak boleh mengakibatkan penyalahgunaan bansos.

Mengenai WTP, pihaknya sangat berharap kepada K/L, terutama pemda, yang konsisten mendapat predikat tersebut. Diharapkan, pemda makin baik dalam mengelola keuangan daerah. "Termasuk mereka yang memiliki menteri keuangan di daerah," tambahnya. ***(byu/c5/oki)***